

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	IV
ABSTRACT.....	V
INTISARI.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
ARTI SINGKATAN.....	XIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. KEASLIAN PENELITIAN	10
E. MANFAAT PENELITIAN	13
1. Pengembangan Ilmu Penelitian	13
2. Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. TEORI KEADILAN.....	15
B. TEORI KEPASTIAN HUKUM	16
C. KONSEP TRANSISI ENERGI YANG BERKEADILAN (<i>JUST ENERGY TRANSITION</i>)	18
D. TINJAUAN UMUM <i>EARLY RETIREMENT</i> PLTU DI INDONESIA	21
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN	28
B. DATA.....	29
C. CARA/TEKNIK PENGUMPULAN DATA	33
D. ANALISIS DATA	33
E. PENARIKAN KESIMPULAN.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. IMPLIKASI DARI TIDAK DIATURNYA SUBSTANSI DALAM DOKUMEN DUKUNGAN PENDANAAN DALAM PERMEN ESDM 10/2025 TERHADAP PELAKSANAAN <i>EARLY RETIREMENT</i> PLTU	36
1. Wanprestasi oleh Pemerintah dan/atau PLN akibat Ketidakmampuan Mengembalikan Pinjaman.....	36
2. Beban Bunga Pembiayaan Tinggi	50

B. FORMULASI STANDAR MINIMUM KLAUSUL DALAM DOKUMEN PERIKATAN ANTARA PEMBERI DUKUNGAN PENDANAAN DENGAN PEMERINTAH DAN/ATAU PLN DALAM PELAKSANAAN <i>EARLY RETIREMENT</i> PLTU.....	55
1. Formulasi Standard Minimum Klausul Dalam Dokumen Perikatan antara Pemberi Dukungan Pendanaan dengan Pemerintah dan/atau PLN.....	57
2. Pilihan Produk Hukum Untuk Substansi Dokumen Dukungan Pendanaan dan Formulasi Standard Minimum Klausul Dalam Dokumen Perikatan antara Pemberi Dukungan Pendanaan dengan Pemerintah dan/atau PLN.....	64
3. Advokasi Penyusunan Produk Hukum Untuk Mengakomodasi Pengaturan Substansi Dokumen Dukungan Pendanaan dan Formulasi Standard Minimum Klausul Dalam Dokumen Perikatan antara Pemberi Dukungan Pendanaan dengan Pemerintah dan/atau PLN	71
BAB V PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kebutuhan Tambahan Pembangkit dan <i>Storage</i> Skenario RE Base Total Indonesia	22
Tabel 2.2.	Kebutuhan Tambahan Pembangkit dan <i>Storage</i> Skenario ARED Total Indonesia	23
Tabel 4.1.	Profil Risiko Penyusunan Substansi Dokumen Dukungan Pendanaan Terhadap Pelaksanaan <i>Early Retirement</i> PLTU	36
Tabel 4.2.	Pembobotan Kriteria Hasil <i>Analytical Hierarchy Process</i>	37
Tabel 4.3.	Pengaturan Klausul Standar Dokumen Perikatan	60
Tabel 4.4.	Hasil <i>Benchmark</i> Dokumen Peraturan di Indonesia yang Mengatur Mengenai Kerja Sama Pendanaan	65
Tabel 4.5.	Hasil <i>Benchmark</i> Dokumen Peraturan di Indonesia yang Mengatur Klausul Standar Perjanjian	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perbandingan Skenario Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan	24
Gambar 4.1	Proyeksi Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik (dalam gigawatt)	43
Gambar 4.2.	Alur Penyusunan Peraturan Menteri	71

ARTI SINGKATAN

No.	Penulisan Singkat	Penulisan Lengkap
1.	Afolu	<i>Agriculture Forestry and Other Land Use</i>
2.	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3.	BESS	<i>Battery Energy Storage System</i>
4.	BPP	Biaya Pokok Penyediaan
5.	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
6.	COP	<i>Conference of the Parties</i>
7.	EBT	Energi Baru dan Terbarukan
8.	E-NDC	<i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
9.	EPC	<i>Engineering, Procurement, and Construction</i>
10.	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
11.	GRK	Gas Rumah Kaca
12.	ILO	International Labour Organization
13.	IPCC	Intergovernmental Panel in Climate Change
14.	IPPU	<i>Industrial Processes and Product Use</i>
15.	IRENA	International Renewable Energy Agency
16.	JTF	<i>Just Transaction Fund Regulation</i>
17.	JTM	<i>Just Transition Mechanism</i>
18.	NZE	<i>Net Zero Emission</i>
19.	PJBL	Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
20.	PLN	Perusahaan Listrik Negara
21.	PLTS	Pembangkit Listrik Tenaga Surya
22.	PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batu Bara
23.	PPL	Pengembang Pembangkit Listrik
24.	RUKN	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
25.	RUPTL	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik